



ပိဗ်းၵိၵ်ႉ ၵပူၼ်ႉၵိၵ်ႉ တၢ်ပိ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ
SEKRETARIAT DAERAH

ႁူၼ်ႉႁူၼ်ႉ ၵပူၼ်ႉၵိၵ်ႉ - တၢ်ပိ (ပိၵ်ႉၵိၵ်ႉ) ၵပူၼ်ႉၵိၵ်ႉ (ပိၵ်ႉၵိၵ်ႉ) ၵပူၼ်ႉၵိၵ်ႉ
JALAN BASUKI RAHMAT DENPASAR – BALI (80235), TELEPON (0361) 224671
WEBSITE : www.baliprov.go.id

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bali
 melalui Bapak Asisten Administrasi Umum
Dari : Kepala Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali
Tanggal : 6 Desember 2023
Nomor : B.44.045/50092/AKAK/B.UMPRO
Sifat : Segera
Lampiran : 1(satu) gabung
Hal : Mohon Tanda Tangan Laporan Audit Kearsipan Internal
(LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) Tahun 2023

Menindaklanjuti Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan ANRI No. 6 Tahun 2019 mengamanatkan Pengawasan atas pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Pengawasan Kearsipan Internal. Di mana nilai Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dengan bobot 60% dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal dengan bobot 40%;
2. Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali telah selesai melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal dengan proses pelaksanaan sebagai berikut :
 - a) Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Daerah Provinsi Bali, dengan Keputusan Gubernur Nomor 435/01-f/hk/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 276/01-F/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan Internal Daerah Provinsi Bali.
 - b) Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Eksternal Daerah Provinsi Bali, dengan Keputusan Gubernur Nomor 436/01-F/HK/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 277/01-F/HK/2022 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan Eksternal Daerah Provinsi Bali.
 - c) Pelaksanaan Rapat Koordinasi Program Kegiatan Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun Anggaran 2023 pada tanggal 8 Maret 2023, yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Bali dan LKD Kabupaten/Kota se-Bali.

d) Pengawasan...



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- d) Pengawasan Kearsipan Internal dan Eksternal dilaksanakan dengan melakukan observasi ke objek pengawasan dan wawancara dengan menggunakan Formulir ASKI dan ASKE yang disertai dengan bukti dukung, lanjut dilakukan verifikasi.
- e) Hasil verifikasi dituangkan dalam Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) yang kemudian disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dan LKD Kabupaten/Kota untuk mendapat klarifikasi dan persetujuan.
- f) Melalui aplikasi sistem Pengawasan Kearsipan, RHAS masing-masing Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota dihitung dan ditentukan nilainya yang kemudian dimohonkan untuk di verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. RHAS menjadi dasar penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) dan Laporan Audit Kearsipan Eksternal (LAKE) dengan Rangkuman Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah Provinsi Bali dan Nilai Audit Kearsipan Eksternal Pemerintah Kabupaten/Kota pada lampiran I dan II.

Demikian laporan kami, bila Bapak berkenan mohon tandatangan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BIRO UMUM DAN PROTOKOL
I WAYAN BUDIASA
NIP. 19730904 199302 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran I

Nomor : B.44.045/50092/AKAK/B.UMPRO

Tanggal : 6 Desember 2023

RANGKUMAN NILAI AUDIT KEARSIPAN INTERNAL

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI BALI TAHUN 2023

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
1.	Dinas Perhubungan Provinsi Bali	95,71	AA (sangat memuaskan)
2.	Biro Umum dan Protokol Setda Provinsi Bali	93,71	AA (sangat memuaskan)
3.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali	84,18	A (memuaskan)
4.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali	83,71	A (memuaskan)
5.	Biro Hukum Setda Provinsi Bali	83,28	A (memuaskan)
6.	Rumah Sakit Umum Daerah Bali Mandara Provinsi Bali	82,05	A (memuaskan)
7.	Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	81,87	A (memuaskan)
8.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali	81,44	A (memuaskan)
9.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Bali	80,37	A (memuaskan)
10.	Rumah Sakit Mata Bali Mandara Provinsi Bali	80,04	A (memuaskan)
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali	79,61	BB (sangat baik)
12.	Badan Penghubung Provinsi Bali	79,48	BB (sangat baik)
13.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali	78,12	BB (sangat baik)
14.	Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali	77,83	BB (sangat baik)
15.	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali	76,30	BB (sangat baik)
16.	Sekretariat DPRD Provinsi Bali	74,92	BB (sangat baik)
17.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali	74,23	BB (sangat baik)
18.	Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali	71,58	BB (sangat baik)
19.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Provinsi Bali	71,27	BB (sangat baik)
20.	Dinas Kesehatan Provinsi Bali	70,81	BB (sangat baik)
21.	Dinas Kebudayaan Provinsi Bali	70,46	BB (sangat baik)
22.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali	68,17	B (baik)
23.	Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali	68,17	B (baik)
24.	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali	67,36	B (baik)
25.	Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali	64,92	B (baik)
26.	BKPSDM Provinsi Bali	62,82	B (baik)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



NO.	PERANGKAT DAERAH	NILAI	KATEGORI
27.	Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali	62,57	B (baik)
28.	Inspektorat Daerah Provinsi Bali	59,62	CC (cukup)
29.	Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali	59,49	CC (cukup)
30.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bali	55,52	CC (cukup)
31.	Dinas Pariwisata Provinsi Bali	54,77	CC (cukup)
32.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali	53,28	CC (cukup)
33.	Biro Organisasi Setda Provinsi Bali	53,10	CC (cukup)
34.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali	49,03	C (kurang)
35.	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali	44,19	C (kurang)
36.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali	39,66	C (kurang)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Lampiran II

Nomor : B.44.045/50092/AKAK/B.UMPRO

Tanggal : 6 Desember 2023

RANGKUMAN NILAI AUDIT KEARSIPAN EKSTERNAL

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BALI TAHUN 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	NILAI LAKE		NILAI ASKI 5 PD TERTINGGI		NHP (LAKE 60%+ ASKI 40%)	KATEGORI
		TOTAL	60%	TOTAL	40%		
1.	Pemerintah Kabupaten Badung	97,31	58,39	89,92	35,96	94,35	AA (sangat memuaskan)
2.	Pemerintah Kabupaten Klungkung	71,15	42,69	79,10	31,64	74,33	BB (sangat baik)
3.	Pemerintah Kota Denpasar	64,82	38,88	85,39	34,15	73,04	BB (sangat baik)
4.	Pemerintah Kabupaten Jembrana	71,34	42,80	68,75	27,50	70,30	BB (sangat baik)
5.	Pemerintah Kabupaten Buleleng	67,79	40,67	68,70	27,48	68,15	B (baik)
6.	Pemerintah Kabupaten Tabanan	62,80	37,68	65,79	26,31	63,99	B (baik)
7.	Pemerintah Kabupaten Bangli	54,43	32,65	54,80	21,92	54,57	CC (cukup)
8.	Pemerintah Kabupaten Karangasem	50,95	30,57	46,20	18,48	49,05	C (kurang)
9.	Pemerintah Kabupaten Gianyar	41,09	24,65	40,15	16,06	40,71	C (kurang)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

